

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya (KBBI). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang maka pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan otonomi daerah melakukan sejumlah kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan daerah sehingga bisa mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik. Kinerja keuangan pemerintah yang baik akan membawa dampak yang juga baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Bogor melakukan bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Walikota sebagai kepala daerah mempertanggungjawabkan hasil kerja badan kepada pemerintah pusat. Dan sebagai instansi yang nirlaba, maka pemerintah mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara eksternal kepada masyarakat dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban pemerintah dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang melaporkan hasil kerja pada setiap periodenya.

Pelaporan berperan penting terhadap akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan kenegaraan yang telah diamanatkan kepada pemerintah berhak mendapatkan pelaporan kinerja pemerintah sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu pengukuran kinerja keuangan. Dengan diukurnya kinerja keuangan pada pemerintah daerah, maka akan diketahui sejauh mana pemerintah sudah berhasil mengatasi permasalahan terkait dengan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintahan harus memenuhi konsep *value for money*, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4) penyerapan anggaran; 5) kondisi keuangan daerah; dan 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun dimensi yang akan digunakan di dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor selama lima tahun terakhir (2015-2019) adalah poin ke-5 (lima) tentang kondisi keuangan daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang didapat menjadi hambatan penulis dalam melakukan pembahasan terhadap dimensi lain.

Selain rasio keuangan yang dijabarkan di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, terdapat beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun rasio-rasio lain yang akan digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Rasio Likuiditas; 2) Rasio Solvabilitas; 3) Rasio Pendapatan; serta 4) Rasio Belanja.

Hal inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Data yang akan digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah data laporan keuangan Kota Bogor pada tahun 2015-2019. Maka dari itu penulis memutuskan untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 berdasarkan rasio Permendagri Nomor 19 Tahun 2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio likuiditas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio solvabilitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio pendapatan?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio belanja?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
2. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio likuiditas.
3. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio solvabilitas.
4. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio pendapatan.
5. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019 berdasarkan rasio belanja.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor  
Sebagai sumbangsih dalam bidang pengetahuan dan referensi Mahasiswa/Iain terkait dengan program studi Akuntansi.



2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Diharapkan tugas akhir ini dapat menjelaskan dengan baik kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sehingga dapat menjadi kritik dan saran yang membangun, agar dapat terpacu untuk selalu menjadi lebih baik ke depannya dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lainnya  
Menjadi jembatan informasi antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan masyarakat serta menjadi referensi dalam penelitian terkait dengan penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
4. Bagi penulis  
Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir, menjadi wadah untuk mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, serta dapat mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui hasil analisa yang dilakukan.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.